

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN LATAMBAGA  
KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**

Abdul Sabaruddin \*

Maulid\*\*

**Abstrack:** *This paper would like to explain the implementation of poverty reduction program in Latambaga Kolaka District. A qualitative approach is used to look at social phenomena related to human behavior and work processes. Observational case study, directed to specific groups and networks of actors involved in poverty reduction policy formulation In accordance with the theme of policy studies. The information data obtained in analyzed by using interactive model. These poverty alleviation programs do not seem to have changed lives for the target community. Kolaka Regency Government encountered obstacles with limited limitations both organizational, management and finance. Even the main obstacle is the behavior of the beneficiary community. A finding in the field, another factor that has not been effective in poverty reduction programs is the unavailability of valid poverty data.*

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan Publik, Penanggulangan Kemiskinan.*

Hasil kajian menunjukkan, program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yakni meliputi 5 (lima) program program nasional yakni program kelompok usaha bersama (KUBE), beras miskin (Raskin), Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta program inovasi pemerintah Kabupaten Kolaka yaitu program bantuan kepada orang tua lanjut usia (Lansia). Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut nampaknya belum memberikan perubahan hidup bagi masyarakat sasaran program. Pemerintah Kabupaten Kolaka menemui kendala dengan keterbatasan keterbatasan baik secara organisasi, manajemen maupun keuangan. Bahkan kendala utama adalah prilaku masyarakat penerima program. Prilaku ini terkait dengan kultur masyarakat yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut sebagai sumber ekonomi keluarga.

Kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar yang dihadapi oleh negara-negara didunia terutama negara yang sedang berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, dimana faktor-faktor ini saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, pendidikan, kondisi geografis dan kondisi lingkungan. Menurut Rais (1995: 227) penyebab orang menjadi miskin adalah: 1) perbedaan akses ekonomi yang dimiliki 2) ketidakberuntungan yang dimiliki oleh "Kelompok Masyarakat Miskin" 3) ketimpangan distribusi 4) pembangunan sebagai ideologi 5) strategi pembangunan dan industrialisasi 6) intervensi pemerintah.

---

\*Ilmu Administrasi Negara/FISIP Universitas Sembilanbelas November Kolaka alamat koresponden penulis, email: [abdulsabaruddin@gmail.com](mailto:abdulsabaruddin@gmail.com).

\*\*FISIP Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

Pada dekade 1990-an pemerintah memunculkan kembali program pengentasan kemiskinan, diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra). Adanya program-program tersebut dan program pembangunan lainnya secara perlahan-lahan mampu menurunkan angka kemiskinan. Timbulnya krisis ekonomi tersebut, maka pemerintah melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk. Aktivitas program ini: 1) Program keamanan pangan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk keluarga miskin; 2) Program pendidikan dan perlindungan sosial; 3) Program kesehatan melalui aktivitas memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin; 4) Program padat karya untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002: 29-30)

Untuk menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka, pemerintah daerah telah melakukan upaya salah satunya dengan membentuk tim penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka. Tim ini dibentuk Bupati Kolaka berdasarkan surat keputusan Nomor: 188.45/123/2015 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kolaka. Tugas tim ini adalah melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti karena obyek yang diteliti adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan perilaku manusia dan proses kerja. Sedangkan Tipe kajian ini adalah deskriptif. Menurut Copper dan Emory (1996) dikutip Silalahi (2009) tipe kajian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. Data informasi yang diperoleh dalam kajian akan dianalisis dengan menggunakan model interaktif. Dalam model interaktif terdapat tiga komponen analisis menurut Miles dan Humberman (1992 yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **Kajian Penanggulangan Kemiskinan di Latambaga**

Untuk mengkaji implementasi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Latambaga penulis menggunakan teori yang dikembangkan dari Mazmanian & Sabatier (1986).

#### *1. Karakteristik dari Masalah (Trackability of the Problem)*

##### a. Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah

Berdasarkan hasil kajian belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan, salah satu diantaranya disebabkan pola hidup penerima program atau kelompok sasaran. Pola hidup ini terkait dengan perilaku yang tidak mau berubah. Bantuan yang diterima digunakan untuk kebutuhan lain bukan peruntukkan bantuan yang diterima. Kelompok sasaran mendapat bantuan dari program digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, penerima program yang tidak tepat sasaran, sehingga tujuan program-program tidak tercapai. Kemudian kebijakan pengentasan kemiskinan selama ini juga lebih banyak didesain secara sentralistik oleh pemerintah pusat dengan menggunakan dukungan alokasi dan distribusi anggaran dari

APBN. Pemerintah daerah hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan program melalui alokasi dana dari pemerintah pusat.

Padahal keberhasilan program pengentasan kemiskinan terletak pada identifikasi akurat kelompok dan wilayah yang ditargetkan sebagai sasaran program. Penetapan kelompok sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk memahami karakteristik kelompok sasaran, karena penanggulangan kemiskinan selama ini hanya melihat persoalan kemiskinan pada tataran gejala-gejala yang tampak dari luar dan hanya melihat dari satu sisi saja atau bersifat parsial. Misalnya kurangnya modal, tidak memiliki keterampilan, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan, dan keterbatasan lapangan kerja. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan tidak berjalan.

#### *b. Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran*

Program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Latabaga adalah program keluarga harapan (PKH), program kelompok usaha bersama (KUBE), beras miskin (Raskin), Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta program bantuan kepada orang tua lanjut usia (Lansia).

Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut nampaknya belum memberikan perubahan hidup bagi masyarakat sasaran program. Pemerintah Kabupaten Kolaka menemui kendala dengan keterbatasan keterbatasan baik secara organisasi, manajemen maupun keuangan. Bahkan kendala utama adalah prilaku masyarakat penerima program. Prilaku ini terkait dengan kultur masyarakat yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut sebagai sumber ekonomi keluarga. Akibatnya upaya penanggulangan kemiskinan dengan dua strategi utama yang ditempuh yakni melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka dan memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru belum berjalan maksimal.

Temuan dilapangan, faktor lain yang menyebabkan belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan adalah tidak tersedianya data kemiskinan yang valid. Tidak validnya data kemiskinan terbukti dengan tidak tergambarnya kondisi miskin secara spesifik, penyebab kemiskinan, rencana tindak secara fisik serta basis usaha yang jelas untuk penanggulangan kemiskinan. Dengan tidak tersedianya data yang jelas dan spesifik seperti itu, dapat dipastikan program apapun yang dijalankan untuk mereduksi angka kemiskinan, tetap tidak akan berhasil dengan optimal. Kenyataan dilapangan sering mengindikasikan program yang salah sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat miskin. Data yang tidak valid disebabkan oleh berbagai hal antara lain metode pengambilan data yang kurang tepat serta kurangnya kemampuan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam operasionalisasi pengumpulan data.

#### *c. Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Populasi*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan TNP2K, bahwa perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kolaka selama 5 (Lima) tahun terakhir dari 2010-2014 mengalami tingkat penurunan yang relative lambat. Tingkat kemiskinan selama lima tahun terakhir hanya mengalami

penurunan sebesar 3,88 %. Namun demikian implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka khususnya di Kecamatan Latambaga seperti program Raskin, PKH, KUBE, dan bantuan langsung tunai kepada Lansia masih mengalami hambatan. Temuan lapangan menunjukkan nama penerima bantuan khususnya bantuan siswa miskin (BSM) masih ada yang dobel, tidak tepat sasaran. Kemudian pembagian Raskin dalam bentuk liter walaupun penyalurannya telah sampai dititik bagi. Dalam penyaluran Raskin oleh kepala desa dan kelurahan belum sepenuhnya mengacu pada Juknis sehingga masih terdapat penyaluran Raskin yang tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Latambaga bervariasi. Data rumah tangga miskin sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan yakni : rumah tangga miskin penerima program Raskin 423 RTS, program KUBE 240 orang, program keluarga harapan (PKH) 225 RTS, program KKS 1794 orang, penerima BLT khusus Lansia 150 orang. Sedangkan penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 58 kepala keluarga. Sementara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kolaka berdasarkan data Dinas Sosial sebanyak 22.202 RTM, sedangkan data PPLS tahun 2011 yang terdaftar sebagai rumah tangga sasaran PSKS sebanyak 14.945 RTS atau 67,31 persen dari total penduduk miskin di daerah. Dengan demikian masih terdapat 7.257 RTM atau 32,69 persen penduduk miskin yang belum terdata sebagai peserta PSKS.

## **Karakteristik Kebijakan**

### *a. Kejelasan Isi Kebijakan*

Untuk mendukung efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka pada tahun 2014 dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui peraturan Bupati Kolaka Nomor 188.45/191 Tahun 2014. Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, pemerintah Kabupaten Kolaka telah menetapkan kebijakan dimana kebijakan program tersebut dikelompokkan dalam empat klaster, yaitu:

1. Klaster satu: kegiatan klaster satu diarahkan kepada bantuan sosial terpadu berbasis individu, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dengan memberikan bantuan program penanggulangan kemiskinan yang mencakup bantuan kepada keluarga sasaran, bantuan langsung program raskin, BSM, Jamkesmas, dan Jamkesda.
2. Klaster dua: program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat, yang bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, seperti PNPM mandiri, KUBE (Kolempok Usaha Bersama), PUAP (Program Usaha Agribisnis Pertanian).
3. Klaster tiga: program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil, seperti program bansos kredit simpan pinjam (KSP) dan program kredit usaha rakyat (KUR).

4. Klaster empat: program penanggulangan kemiskinan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti program pengembangan lingkungan sehat, pendidikan, bantuan benih padi, bantuan alat pertanian, bantuan ternak dan lain-lain.

Khusus kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kecamatan Kolaka melalui dua kelompok (klaster) program, yaitu

1. Bantuan dan perlindungan sosial berbasis individu dan keluarga. Program-program tersebut meliputi :
  - a. Program Keluarga Harapan (PKH) dengan lingkup program Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita dan Pengurangan kematian ibu melahirkan.
  - b. Kartu Indonesia Pintar (KIP): Bantuan berupa uang kepada anak putus sekolah usia 7-18 tahun.
  - c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Bantuan berupa tabungan Rp 200.000,/bulan
  - d. Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin): Pendistribusian beras maksimal 20 kg/KK/bulan;
  - e. Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Lansia;
  - f. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Perbaikan rumah tidak layak huni (atap, lantai, dinding, MCK)
2. Pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok masyarakat, meliputi : program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan bentuk program Pemberdayaan ekonomi masyarakat atau ekonomi rakyat miskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP).

### **Alokasi Sumber daya Finansial terhadap Kebijakan**

Pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat. Dalam program-program regulatif, dana juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga personalia dan untuk memungkinkan dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan/regulasi. Menurut Wahab (2010) secara umum tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal, dan tersedianya dana di atas tingkat batas ambang ini akan sebanding dengan peluang tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Hasil kajian lapangan, jumlah anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD yang dialokasikan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka yang dikelompokkan dalam empat klaster sebesar Rp 142.305.560.787 serta program pemberdayaan UMKM Rp. 87.484.000.000. Pada program penanggulangan kemiskinan pada Klaster Pertama sebesar Rp. 72.981.841.341, klaster kedua Rp 10.216.336.000, klaster tiga Rp 87.484.000.000 dan klaster empat Rp 59.107.383.446.

### **Tingkat Komitmen Aparat**

Komitmen dalam menjalankan program kebijakan merupakan aspek penting dan dapat dijadikan sebagai keunggulan organisasi dalam menyatukan gerak dan tujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Tingginya komitmen aparat pelaksana dalam pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan berdampak pada keberhasilan program. Pelaksana program harus memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan pelaksana program yang memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut.

Pelaku utama program penanggulangan kemiskinan adalah masyarakat/keluarga miskin selaku penerima program, sedangkan pelaku di tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya lebih berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat tercapai, dipenuhi dan dilaksanakan dengan benar dan konsisten. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan tingkat komitmen dan keterampilan aparat pelaksana sebagai pendamping dalam proses pemberdayaan telah menunjukkan profesionalitasnya sebagai fasilitator, motivator, edukator dan mediator. Pendamping program memiliki kemampuan karena telah diberikan pelatihan terlebih dahulu. Materi pelatihan terkait program penanggulangan kemiskinan terutama menyangkut tujuan program, pengelolaan program dan pembiayaan program dan pembuatan laporan program.

Namun, tingkat komitmen aparat dalam penentuan penerima program masih rendah. Penerima program (masyarakat/keluarga miskin) tidak tepat sasaran bahkan terkesan diskriminatif. Masyarakat/keluarga miskin yang menerima program adalah mereka yang memiliki kedekatan dengan aparat pelaksana. Bahkan jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat/keluarga miskin yang menjadi sasaran program. Misalnya dalam program pemberdayaan berbasis kelompok melalui program kelompok usaha bersama (KUBE). Kementerian sosial sebagai pihak penanggungjawab program ini, kemudian mendelegasikan wewenangnya kepada dinas sosial Kabupaten Kolaka untuk membentuk kelompok usaha dan pendamping. Akan tetapi beberapa kelompok yang terbentuk bukan dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat akan usaha tersebut. Bahkan kelompok usaha yang terbentuk hanya milik pribadi yang dibentuk oleh pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan kewenangannya yang tujuannya agar dana bisa cair.

### **Akses Kelompok Luar terhadap Kebijakan**

Salah satu unsur dalam suatu implementasi kebijakan berjalan dengan baik adalah adanya akses kelompok di luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya akan relatif mendapatkan dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Keterlibatan warga di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sangat dirasakan kurang besar. Hal ini disebabkan kegiatan yang ada tidak disosialisasikan secara berkelanjutan dan hanya pihak-pihak tertentu yang tahu tentang program ini. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa program ini merupakan program baru dan masih perlu digalakkan lebih besar agar masyarakat dapat aktif. Selama ini, dinas sosial yang aktif tanpa adanya *feedback* dari masyarakat secara cepat. Butuh suatu proses lain agar mereka merasa yakin bahwa ini adalah suatu program yang bisa menjawab pertanyaan mereka selama ini.

Hasil kajian diperoleh bahwa tim koordinasi penanggulangan kemiskinan melibatkan perguruan tinggi, perusahaan dan LSM. Semua lembaga berkerjasama dalam sebuah kelompok kerja. Tim ini dibagi dalam berbagai kelompok kerja yakni kelompok kerja pendataan masyarakat miskin, kelompok kerja kemitraan dan kelompok kerja penanganan pengaduan masyarakat. Jadi tanggungjawab keberhasilan program penanggulangan kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama bukan saja pemerintah, bahkan yang lebih utama masyarakat miskin atau penerima program itu sendiri.

## **Lingkungan Kebijakan**

### *a. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*

Pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah proses perubahan kondisi perekonomian masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka selama lima tahun terakhir telah mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari capaian awal pada tahun 2010 sebesar 12,01 persen naik menjadi 14,94 persen ditahun 2012, namun mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 7,10 persen dan tahun 2014 menjadi 0,48 persen.

Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak RTSM. Maka program-program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan Raskin, KUBE, KIS, KKS, rehabilitasi RTLH, dan bantuan langsung pada Lansia dimaksudkan untuk membantu RTSM memperoleh kehidupan yang layak baik pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Sehingga Penerima PKH adalah Rumah Tangga Sasaran dengan kondisi sangat miskin. Berdasarkan data PPLS 2011 di Kabupaten Kolaka terdapat jumlah rumah tangga sasaran sebanyak 22.202 RTS dengan income perkapita 30 persen menengah kebawah yang tersebar di 12 kecamatan. Kecamatan Latambaga dari jumlah penduduk 40.792 jiwa masih memiliki penduduk miskin 6.131 jiwa dan RTSM 1.533 jiwa. Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Latambaga sudah mulai membaik, khususnya di sektor jasa, perdagangan, perikanan, pertanian, serta perkebunan. Bahkan Kecamatan Latambaga merupakan pusat perdagangan di Kabupaten Kolaka.

### *b. Komitmen dan Keterampilan Aparat dan Implementor*

Tingkat komitmen pemerintah Kabupaten Kolaka dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kolaka dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melakukan analisis kondisi atau situasi kemiskinan di Kabupaten Kolaka. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi maka dibentuk sekretariat dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kabupaten mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.

- b. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kabupaten berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- c. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kabupaten dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris TKPK Kabupaten Kolaka dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari:

5. Kelompok Kerja Data dan Informasi
  - a. Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPK kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan
  - b. Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
    - Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan
    - Pengembangan indikator kemiskinan daerah
    - Pengembangan sistem informasi kemiskinan, dan
    - Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan
6. Kelompok Kerja Kemitraan
  - a. Kelompok kerja pengembangan kemitraan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPK kabupaten dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan
  - b. Kelompok kerja pengembangan kemitraan dalam melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi :
    - Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
    - Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah
3. Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat
  - a. Kelompok kerja pengaduan masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPK kabupaten dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan
  - b. Kelompok kerja pengaduan masyarakat dalam melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi:
    - Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    - Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    - Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

Implementasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka yang menjadi *leading* sektor adalah Dinas Sosial. Untuk mendukung implementasi program kemiskinan, tenaga pendamping memiliki peran yang strategis. Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk oleh atau ditugaskan oleh pihak yang berwenang baik pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok yang ada di masyarakat.

Pendamping adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang dapat meluangkan waktu untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan.

Temuan lapangan menunjukkan, tenaga pendamping masyarakat miskin yang menjadi sasaran program telah memiliki pengetahuan yang memadai. Mereka sebelum menjadi tenaga pendamping, terlebih dahulu mengikuti pendidikan atau pelatihan. Masalah yang terjadi justru dari masyarakat penerima program. Bantuan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan, di mana persoalan mereka adalah pemenuhan makan hari ini bukan makan hari esok. Bantuan yang diberikan baru dapat menghasilkan setelah 1 hingga 2 tahun lagi, sehingga bantuan ini dianggap kurang relevan. Pelatihan yang diadakan sangat terbatas dan kurang menyentuh substansi yang harus diberikan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis kajian, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka belum berjalan efektif diakibatkan kebijakan pengentasan kemiskinan selama ini lebih banyak didesain secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan program melalui alokasi dana dari pemerintah pusat. Kemudian Tidak tersedianya data kemiskinan yang valid. Tidak validnya data kemiskinan terbukti dengan tidak tergambaranya kondisi miskin secara spesifik, penyebab kemiskinan, rencana tindak secara fisik serta basis usaha yang jelas untuk penanggulangan kemiskinan.

Program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka elum memberikan perubahan hidup bagi masyarakat sasaran program. Pemerintah Kabupaten Kolaka menemui kendala dengan keterbatasan keterbatasan baik secara organisasi, manajemen maupun keuangan. Bahkan kendala utama adalah prilaku masyarakat penerima program. Prilaku ini terkait dengan kultur masyarakat yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut sebagai sumber ekonomi keluarga.

### **Daftar Pustaka**

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Perjemah  
Tjetjep Rohendi Rohidi, Pendamping Mulyarto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Rais, Amien. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, ICMI Pusat-ICMI Orwil. Aditya Media. Yogyakarta:
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Kajian Sosial*. PT. Grefika Aditama. Bandung

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan  
Kemiskinan Daerah (TKPKD) *Dokumen*, Kabupaten Kolaka, 2014.  
Mazmanian, D.A and Sabatier, P.A. 1986. *Implementation and public  
policy*. London, Scoot Foresman and company